

IFG Progress Weekly Digest

Dana Pensiun Indonesia: Kondisi & Tantangan

November 10, 2021 - Issue 5, 2021

Reza Yamora Siregar, Head of IFG-Progress, reza.jamora@ifg.id

Mohammad Alvin Prabowosunu, Research Associate, alvin.prabowosunu@ifg.id

Rizky Rizaldi Ronaldo, Research Associate, rizky.rizaldi@ifg.id

- Diperkirakan periode bonus demografi di Indonesia akan selesai pada tahun 2038 dan biaya untuk menanggung populasi usia non-produktif akan terus meningkat.
- Dari sisi dana pensiun publik, aset BPJS Tenaga Kerja masih rendah bila dibandingkan dengan negara berkembang lainnya.
- Cakupan pekerja yang menjadi peserta dan tingkat kontribusi wajib dana pensiun publik yang rendah merupakan faktor utama penyebab kecilnya penetrasi dana pensiun di Indonesia.

Exhibit 1. Transformasi Piramida Penduduk Indonesia Menunjukkan Berakhirnya Bonus Demografi dan meningkatnya *Dependency*

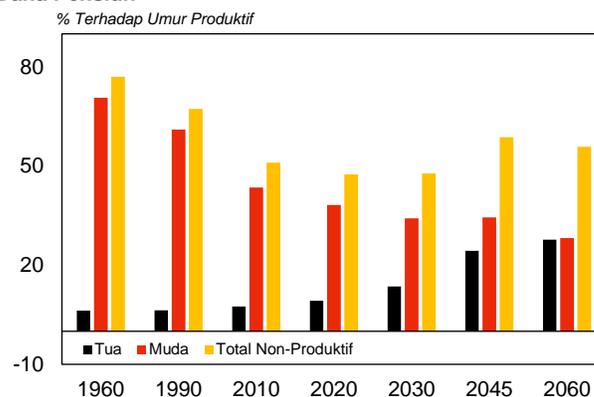


Sumber: United Nations DESA, IFGP Research. Note: Data merupakan jumlah populasi berdasarkan umur dan jenis kelamin per 1 juta penduduk pada tahun 1990, 2020, dan 2045.

Pada tahun 1990, populasi di Indonesia didominasi oleh penduduk yang terbilang relatif muda, dengan persentase usia <20 tahun sebesar 47,4% dan <25 tahun sebesar 57,4% (Exhibit 1). Sejak tahun 2012, Indonesia telah memasuki periode bonus demografi, di mana pertumbuhan kelompok penduduk usia kerja (15-64 tahun) tercatat lebih cepat dari pada pertumbuhan usia kelompok usia non-produktif (<15 tahun dan >64 tahun). Selanjutnya, pada tahun 2020-2022, Indonesia menikmati bonus demografi tertinggi di mana diperkirakan perbandingan antara penduduk usia non-produktif terhadap penduduk usia kerja atau yang dikenal dengan *dependency ratio* berada di level terendah.

Akan tetapi, bonus demografi ini diperkirakan akan berakhir pada tahun 2038¹ dan di tahun 2045 struktur demografi akan bergeser, di mana jumlah penduduk non-produktif akan meningkat secara substantial. Pada tahun 2060, *dependency ratio* diperkirakan sudah di atas 50% (Exhibit 2). Artinya, dua orang penduduk usia kerja (produktif) membiayai lebih dari satu orang penduduk di luar usia kerja (non-produktif). Situasi ini menandakan adanya fenomena *aging-population*.

Exhibit 2. Rasio Penduduk Yang Tidak Berkontribusi Terhadap Dana Pensiun



Sumber: United Nations, IFGP Research. Note: Tua & Muda adalah rasio penduduk tua (>64) & muda (0 - 14) terhadap umur produktif (15 - 64).

¹ Data yang penulis gunakan merupakan proyeksi populasi dari UN DESA. Jika proyeksi BPS digunakan, maka dengan menggunakan *threshold dependency ratio* sebesar 50%, bonus demografi di Indonesia akan berakhir pada 2037. Untuk referensi angka *threshold dependency ratio*, penulis mengacu pada: Wongkaren, T. S., 2020. *Bencana di Puncak Bonus Demografi*. Kompas.

Tren dari *dependency ratio* di atas, terutama potensi akan berakhirnya bonus demografi, menunjukkan beban pembiayaan *aging-population* akan menjadi tantangan besar bagi perekonomian Indonesia. Implikasi tersebut dikonfirmasi dari pengalaman negara lain yang menunjukkan adanya korelasi positif antara persentase penduduk tua di suatu negara dan jumlah pengeluaran dana pensiun publik (Exhibit 3). Semakin banyak persentase penduduk tua di suatu negara, semakin besar pengeluaran dana pensiun publik.² Kesiapan dana pensiun Indonesia menjadi kunci dalam memastikan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang akan menua di masa depan, tanpa mengganggu kesinambungan pembiayaan pertumbuhan ekonomi domestik.

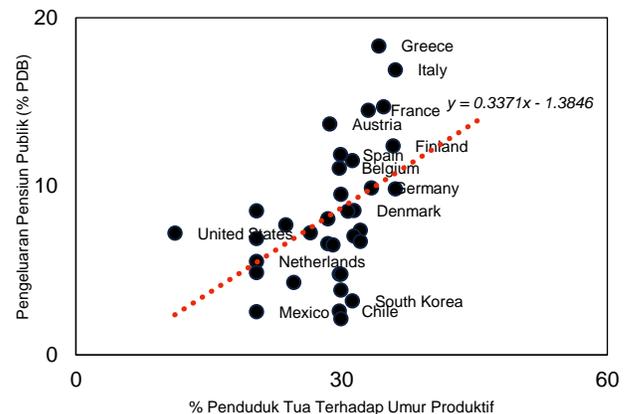
Berdasarkan data pada tahun 2020, penetrasi dana pensiun publik jika dilihat dari total Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS TK), berada di angka 2,73% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) 2020. Angka ini didapatkan dari cakupan BPJS TK yang sudah memiliki keanggotaan sekitar 15,8 juta pekerja³. Tingkat kontribusi wajib yang harus disediakan pekerja dan pemberi kerja adalah sebesar 8,7%, yang terdiri dari tingkat kontribusi BPJS Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 5,7% dan Jaminan Pensiun (JP) sebesar 3%⁴.

Apabila dana pensiun publik dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dikelola oleh Taspen (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri) dan Prajurit TNI serta Anggota Polri yang dikelola oleh Asabri (Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) dimasukkan dalam perhitungan, maka cakupan dana pensiun publik Indonesia mencapai 4,79% dari total PDB, dengan cakupan sekitar 20,82 juta pekerja dan dengan tingkat kontribusi wajib sebesar 8% (Exhibit 4). Selanjutnya, jika dana pensiun pihak ketiga (swasta) juga dimasukkan, maka cakupan dana pensiun di Indonesia secara keseluruhan mencapai 6,88% dari total PDB dengan cakupan sekitar 25,16 juta pekerja.

Dibandingkan dengan kategori dana pensiun yang sama di beberapa negara berkembang lainnya, aset dana pensiun di Indonesia masih relatif rendah. Penetrasi aset dana pensiun publik (diluar Asabri & Taspen) berada di angka 2,73% dari PDB, jauh di bawah level beberapa negara berkembang lainnya seperti India (7,20%), Thailand (12,74%), Brazil (14,97%), dan Malaysia (61,42%). Laju pertumbuhan tahunan aset dana pensiun publik Indonesia juga belum cukup cepat, dengan pertumbuhan aset total hanya sebesar 11,43% di 2020. Angka ini juga cukup jauh tertinggal dibandingkan dengan India dan Turki yang mempunyai tingkat pertumbuhan aset di atas 25% (Exhibit 5).

² Referensi studi utama: Bongaarts, J., 2004. Population aging and the rising cost of public pensions. *Population and Development Review*, 30(1), pp.1-23.
³ Hanya berdasarkan keanggotaan JHT BPJS TK, karena ada kemungkinan adanya keanggotaan ganda antara JP dan JHT.
⁴ Persentase total pendapatan yang dikontribusikan ke dalam Dana Pensiun.

Exhibit 3. Korelasi Antara Rasio Penduduk Tua (% dari Umur Produktif) Dengan Belanja Pensiun Publik (%PDB) Di Negara OECD



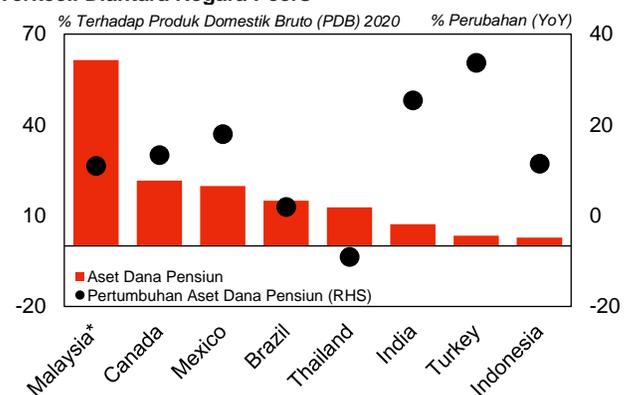
Sumber: OECD, IFGP Research. Note: Studi kasus menggunakan 35 Negara OECD pada tahun 2019. Penduduk Tua adalah kategori >64 tahun dan Umur Produktif adalah 15 – 64 tahun. Pengeluaran Pensiun Publik adalah seluruh pengeluaran untuk pensiun hari tua & survivors

Exhibit 4. Rangkuman Data Dana Pensiun Indonesia

Kategori	Penetrasi (% terhadap PDB)	Cakupan (Juta Pekerja)
Publik	4.79	20.82*
BPJS TK**	2.73	15.80
Asabri	0.21	0.90
Taspen	1.85	4.12
Swasta	2.09	4.34
DPPK	1.34	1.32
DPLK	0.75	3.02
Total Dana Pensiun Publik & Swasta	6.88	25.16

Sumber: Kementerian Keuangan, OJK, Laporan Tahunan BPJS, ASABRI, & TASPEN, IFGP Research. Note: *Untuk Menghindari Double Counting Kami Menggunakan Angka Yang Lebih Besar di JHT (Jaminan Hari Tua) dibanding JP (Jaminan Pensiun)

Exhibit 5. Dana Pensiun Indonesia Merupakan Salah Satu Yang Terkecil Diantara Negara Peers



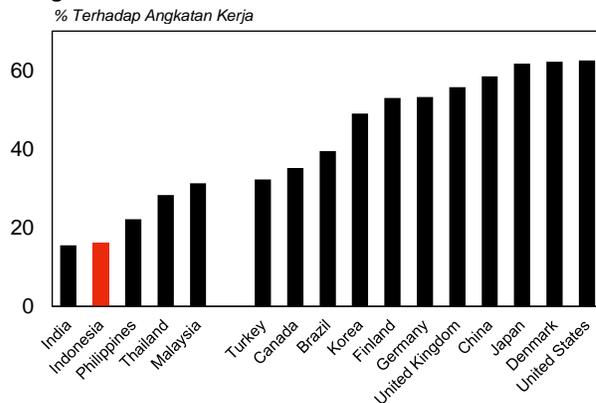
Sumber: OECD, IFGP Research. Note: Program disesuaikan agar sedekat dan semirip mungkin dengan JP & JHT dalam hal Tipe (compulsory/voluntary), Kontribusi (Funded/Unfunded), & Cakupan (all/worker). UK (OCP), Canada (CPP), Mexico (SIEFORES), Brazil (REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIA), Thailand (SSF), Russia (NPF), Turkey (SGK), India (EPFO), Indonesia (JP & JHT), Malaysia (EPF). Berdasarkan PDB 2020 masing-masing negara. Semua data adalah data 2020, *kecuali Malaysia 2019.

Exhibit 6. Cakupan Dana Pensiun Indonesia Masih Sangat Terbatas & Hampir Tidak Ada Pada Segmen Pekerja Informal



Sumber: OJK, Kementerian Keuangan, BPS, IFGP Research. Note: Data kepesertaan dana pensiun merupakan data yang diambil dari Kementerian Keuangan & OJK pada tahun 2020. Angka Angkatan kerja diambil dari SAKERNAS Agustus 2020. Pengelompokan Formal & Informal mengacu pada pengelompokan BPS. *Dengan JP 17.5; JHT 20.6. Range dibuat untuk menghindari double counting antara JP & JHT

Exhibit 7. Cakupan Dana Pensiun Indonesia Merupakan Salah Satu Yang Terendah



Sumber: ILO, IFGP Research. Note: Data adalah proporsi Angkatan kerja yang secara aktif membayar premi terhadap total Angkatan kerja.

Terdapat dua faktor penting penyebab rendahnya penetrasi aset dana pensiun di Indonesia. Faktor pertama berhubungan dengan jumlah tenaga kerja yang tercakup dari program dana pensiun yang ada. Dari sekitar 128,5 juta pekerja di Indonesia, hanya sekitar 17,5-20,6 juta pekerja formal (dari total sekitar 50,7 juta pekerja formal) yang memiliki tabungan pensiun dari BPJS TK, Taspen, dan Asabri, dan hanya sekitar 200 ribu pekerja informal yang mempunyai akses pada JHT dari BPJS TK (Exhibit 6). Dari angka-angka tersebut, tingkat cakupan dana pensiun publik Indonesia hanya sekitar 13,6% - 16,0% dari total jumlah pekerja dan 16,2% jika memasukan JHT Informal. Terlebih lagi, jika dana pensiun berdasarkan keanggotaan khusus (Taspen dan Asabri) dikeluarkan/hanya berdasarkan JHT, cakupan dana pensiun hanya sekitar 12,9% dari total jumlah pekerja (dihitung dari rasio kepesertaan BPJS TK JHT terhadap total pekerja di luar PNS, TNI, & Polri).

Di sisi lain, hanya sekitar 4,3 juta pekerja yang mempunyai dana pensiun dari pihak swasta (“Dana Pensiun Pihak Ketiga”/DPPK dan “Dana Pensiun Lembaga Keuangan”/DPLK). Jika angka DPPK, DPLK, dan JHT⁵ tersebut digabungkan (tanpa memasukkan Taspen & Asabri), tingkat cakupan program dana pensiun di Indonesia menjadi 16,4% dari total pekerja di Indonesia (dihitung dari rasio kepesertaan BPJS TK JHT + DPPK + DPLK terhadap total pekerja di luar PNS, TNI, & Polri)⁶. Baik 16,2%, maupun 16,4%, kedua angka cakupan ini masih rendah dibandingkan negara-negara Asia (dengan rata-rata 21,27%) seperti Filipina (22,2%), Thailand (28,3%) dan Malaysia (31,3%) dan jauh di bawah negara-negara OECD (dengan rata-rata 50,33%) seperti Inggris (55,7%), Jepang (61,7%), dan Denmark (62,2%) (Exhibit 7).

Dari data yang sama, kita dapat melihat potensi peningkatan cakupan dana pensiun untuk pekerja di Indonesia yang masih sangat besar. Diperkirakan sekitar ±103,3 juta pekerja (sekitar ±73-77 juta pekerja informal dan ±25-30 juta pekerja formal) di Indonesia belum mempunyai akses terhadap dana pensiun (Exhibit 8).

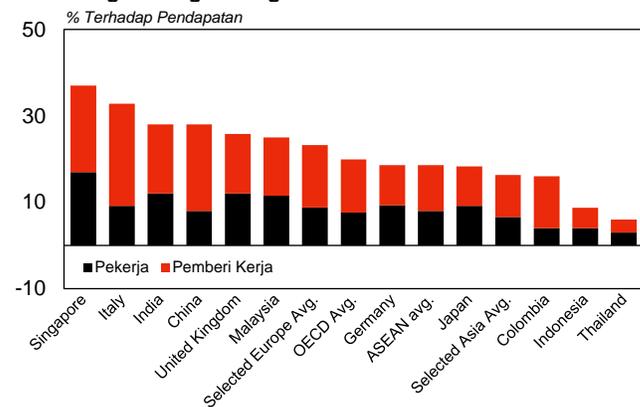
⁵ Studi ini menggabungkan kepesertaan DPPK, DPLK, & JHT karena karakteristik dana pension yang kepesertaannya tidak dibatasi oleh institusi dan regulasi (JP hanya diperuntukan bagi penerima upah)
⁶ Diasumsikan peserta Taspen & Asabri tidak/minim yang ikut menjadi peserta DPPK & DPLK

Exhibit 8. Potensi Cakupan Dari Kepesertaan Dana Pensiun Indonesia Masih Sangat Besar

Deskripsi	Skenario 1		Skenario 2	
	Formal	Informal	Formal	Informal
Total Pekerja	50.8	77.7	50.8	77.7
- DPPK & DPLK	-	4.3	4.3	-
- PT. TASPEN	4.1	-	4.1	-
- PT. ASABRI	0.9	-	0.9	-
- BPJS TK	15.6	0.2	15.6	0.2
Potensi	30.1	73.1	25.8	77.5

Sumber: Kementerian Keuangan, OJK, BPS, IFGP Research. Note: Skenario 1 adalah skenario jika semua kepesertaan DPPK & DPLK terdiri dari pekerja informal. Skenario 2 adalah skenario jika semua kepesertaan DPPK & DPLK terdiri dari pekerja formal. Data kepesertaan merupakan data Desember 2020. Data Pekerja merupakan data SAKERNAS Agustus 2020. Angka BPJS TK adalah angka dari Jaminan Hari Tua (JHT) bukan Jaminan Pensiun (JP) untuk menghindari double counting

Exhibit 9. Rendahnya Tingkat Kontribusi Wajib Indonesia Dibandingkan Negara-Negara Asia & OECD

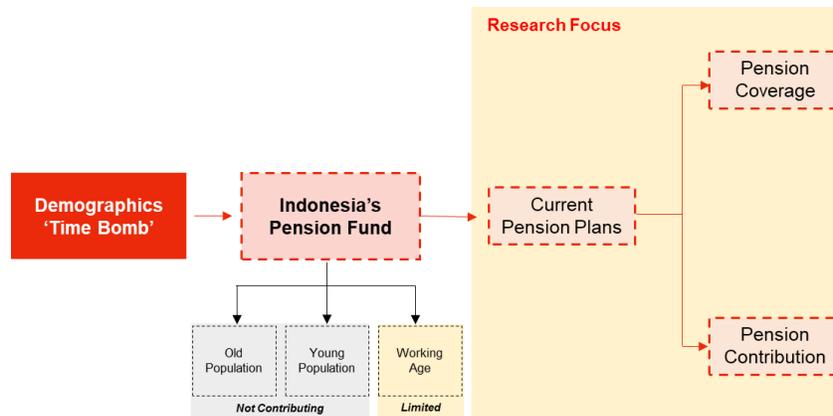


Sumber: OECD, IFGP Research. Note: Kontribusi dibagi berdasarkan sumbernya, yaitu yang berasal dari pekerja dan pemberi kerja

Dengan kata lain, jumlah tenaga kerja kita yang belum mendapat akses ke dana pensiun di 2020 lebih dari 4 kali jumlah yang sudah tercakup.

Faktor kedua berhubungan dengan tingkat persentase kontribusi wajib dari pekerja dan pemberi kerja dari total pendapatan pekerja. Di Indonesia, tingkat kontribusi wajib dana pensiun publik dengan proxy BPJS TK sekitar 8,7%. Total kontribusi ini masih jauh dibawah negara-negara Asia dengan rata-rata tingkat kontribusi 16,32%, seperti Jepang

Exhibit 10. Framework Analisis Dana Pensiun Indonesia



Sumber: IFGP Research.

(18,3%), Malaysia (25%), India (28%)), dan negara-negara Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), dengan rata-rata tingkat kontribusi 19,9%, seperti Colombia (16%), Inggris (25,8%), dan Italia (32,8%).

Di ASEAN sendiri, tingkat kontribusi wajib Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan dengan Filipina (11%), Vietnam (22%), Brunei (17%), dan hanya lebih tinggi dibandingkan Thailand (6.0%) (Exhibit 9)⁷. Evaluasi dari tingkat kontribusi wajib dan cakupan kepesertaan tenaga kerja perlu menjadi bagian utama dari pembentukan langkah strategis untuk mendorong perkembangan sektor dana pensiun publik di Indonesia (Exhibit 10).

In summary, bonus demografi yang saat ini sedang dinikmati Indonesia akan selesai pada tahun 2038. Setelah fenomena ini selesai, beban untuk menanggung masyarakat non-produktif relatif terhadap kontribusi masyarakat produktif pun akan meningkat. Penguatan dan pengembangan dana pensiun di Indonesia menjadi sangat *urgent* dalam waktu yang relatif terbatas. Tingkat penetrasi besaran dana pensiun publik di Indonesia masih lebih rendah dari negara-negara berkembang lainnya seperti Thailand, Brazil, dan Mexico. Studi IFG-Progress berikutnya akan mengestimasi potensi dari dana pensiun Indonesia berdasarkan beberapa skenario cakupan kepesertaan dan tingkat kontribusi wajib. Keberhasilan Indonesia meningkatkan kontribusi dana pensiun tidak hanya dapat membantu pembiayaan hari tua penduduk Indonesia, tapi juga menjadi sumber dana dalam negeri yang besar bagi pembiayaan investasi dan fiskal.

⁷ Dalam studi ini, angka kontribusi yang dilaporkan merupakan kontribusi total, yang merupakan gabungan dari kontribusi dari pekerja (*employee*) dan pemberi kerja (*employer*).

PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)

Gedung Graha CIMB Niaga, 18th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav. 58
RT.5/RW.3, Senayan, Kebayoran Baru
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190
☎ (+62) 021 2505080

 Indonesia Financial Group
 PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia – Persero
 @indonesiafinancialgroup
 @ifg_id

Indonesia Financial Group (IFG)

Indonesia Financial Group (IFG) adalah BUMN Holding Perasuransian dan Penjaminan yang beranggotakan PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja, PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo), PT Bahana Sekuritas, PT Bahana TCW Investment Management, PT Bahana Artha Ventura, PT Bahana Kapital Investa, PT Graha Niaga Tata Utama, dan PT Asuransi Jiwa IFG. IFG merupakan holding yang dibentuk untuk berperan dalam pembangunan nasional melalui pengembangan industri keuangan lengkap dan inovatif melalui layanan investasi, perasuransian dan penjaminan. IFG berkomitmen menghadirkan perubahan di bidang keuangan khususnya asuransi, investasi, dan penjaminan yang akuntabel, prudent, dan transparan dengan tata kelola perusahaan yang baik dan penuh integritas. Semangat kolaboratif dengan tata kelola perusahaan yang transparan menjadi landasan IFG dalam bergerak untuk menjadi penyedia jasa asuransi, penjaminan, investasi yang terdepan, terpercaya, dan terintegrasi. IFG adalah masa depan industri keuangan di Indonesia. Saatnya maju bersama IFG sebagai motor penggerak ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan.

Indonesia Financial Group (IFG) Progress

The Indonesia Financial Group (IFG) Progress adalah sebuah *Think Tank* terkemuka yang didirikan oleh Indonesia Financial Group sebagai sumber penghasil pemikiran-pemikiran progresif untuk pemangku kebijakan, akademisi, maupun pelaku industri dalam memajukan industri jasa keuangan.